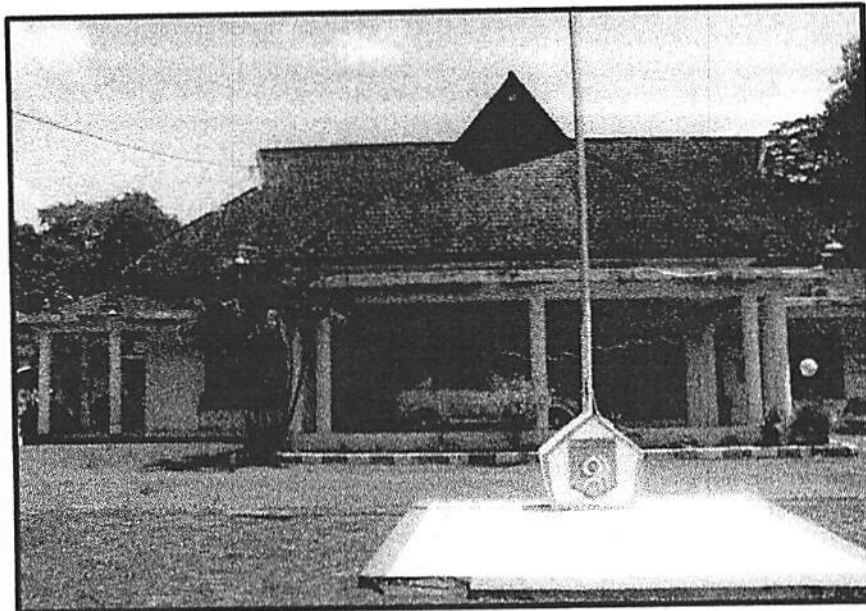




PEMERINTAH KOTA BIMA

**LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KOTA BIMA**

TAHUN ANGGARAN 2020



2021

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
(CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN)**

**DISESUAIKAN DENGAN KODE REKENING
PENDAPATAN DAN BELANJA YANG TERDAPAT
DALAM DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
(DPA) MASING-MASING OPD**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
Pernyataan Tanggungjawab	iv
I LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
II LAPORAN OPERASIONAL	
III LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
IV NERACA	
V CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.....	
BAB II IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA APBD	
2.1 Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD.....	
2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah ditetapkan	
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	
3.1 Entitas Akuntansi/ Pelaporan Keuangan Daerah SKPD	
3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	
3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	
3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP Pada SKPD	
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	
4.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	
4.1.1 Pendapatan LRA	
4.1.2 Belanja	
4.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional	
4.2.1 Pendapatan-LO	
4.2.2 Beban	
4.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	
4.3.1 Perubahan Ekuitas	
4.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca	
4.4.1 Aset	
4.4.2 Kewajiban	

4.4.3 Ekuitas

BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
SKPD

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Per Rincian Obyek**
- Lampiran 2 Laporan Berita Acara Stock Opname Barang**
- Lampiran 3 Laporan Persediaan dan Berita Acara Stock Opname Barang**
- Lampiran 4 Laporan Aset Tetap beserta Berita Acara Rekonsiliasi**
- Lampiran 5 Laporan Aset Lain-Lain**

PEMERINTAH KOTA BIMA INSPEKTORAT

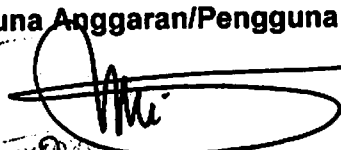
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Inspektorat Kota Bima yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca, (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, Arus Kas, Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kota Bima, 12 Pebruari 2021

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang *g*


INSPEKTORAT
Muhaimin, SE
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP: 19620217 199003 1 010

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KOTA BIMA**

**BAB I
P E N D A H U L U A N**

Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah kemudian dijabarkan dalam peraturan Kepala Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan kepada kepala daerah melalui PPKD, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan pada masing-masing SKPD diantaranya adalah, realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber dana, alokasi dana dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;